

**TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN: STUDI PENGGUNAAN *E-GOVERNMENT*
APLIKASI SIMPEG DI DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**Zahra Zania
NIM. 07011282126156**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN: STUDI PENGGUNAAN E-GOVERNMENT APLIKASI SIMPEG DI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

ZAHRA ZANIA

07011282126156

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H.,
M.Si.
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



Tanggal

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN: STUDI PENGGUNAAN E-GOVERNMENT
APLIKASI SIMPEG DI DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI**

SKRIPSI

Oleh :
ZAHRA ZANIA
07011282126156

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Maret 2025

Pembimbing :

Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan

Penguji :

1. Rizky Ghoffar Ismail, S.Psi., M.Si
NIP. 198806032023211013
2. Rahmat Rafinzar, S.IP., M.A.P
NIP. 199705052024061001

Tanda Tangan

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Zania
NIM : 07011282126156
Jurusan : Administrasi Publik
Kampus : Indralaya
Angkatan : 2021

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Transformasi Digital dalam Manajemen Kepegawaian: Studi Penggunaan *e-Government* Aplikasi SIMPEG di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya,



Zahra Zania

NIM. 07011282126156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah:5)

“Karena Pelaut Hebat Tak Pernah Lahir di Laut yang Tenang.”

(HIVI!)

“Aku lebih baik mati dalam pertarungan daripada mati tanpa melakukan apapun.”

(Haruno Sakura-Naruto Shippuden)

“Kaulah yang harus memilih jalanmu sendiri, tapi jika kau ingin tempat tujuan dan ingin diakui oleh orang lain, kau tidak boleh berhenti maju.”

(Kondo Isao-Gintama)

“Tetap bekerja keras atas sesuatu yang bisa kamu nikmati. PAHAM!”

(Kak Gem)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

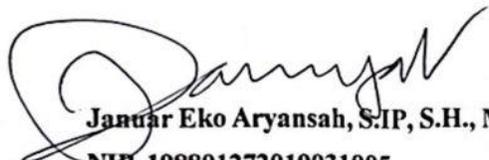
1. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Alm. Sahzan Syafri dan Ibu Siska
2. Diri sendiri, Zahra Zania
3. Kakak dan Adik penulis, Subhan Alghifari dan Farras Rakha
4. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
5. Seluruh Rekan Mahasiswa Administrasi Publik 2021
6. Almamater Kebanggaan yaitu Universitas Sriwijaya

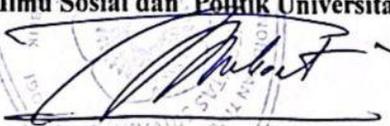
ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari transformasi digital dalam manajemen kepegawaian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa SIMPEG meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi. Namun, tantangan terkait infrastruktur, pemahaman pegawai, dan pembaruan sistem masih ada. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan pegawai, pemeliharaan sistem, dan pengembangan fitur aplikasi.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Manajemen Kepegawaian, SIMPEG, Efisiensi, Transparansi

Pembimbing,


Januar Eko Aryansah, S.IP, S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

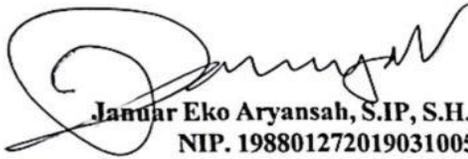

Palembang, 17 Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study analyzes the Employee Management Information System (SIMPEG) application at the Directorate General of Regional Administration of the Ministry of Home Affairs as part of digital transformation in personnel management. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. Results show that SIMPEG improves administrative efficiency, transparency, and accountability, but challenges remain in infrastructure support, employee understanding, and system updates. Recommendations include enhanced employee training, improved system maintenance, and feature development

Keywords: *Digital Transformation, Personnel management, SIMPEG, Efficiency, Transparency*

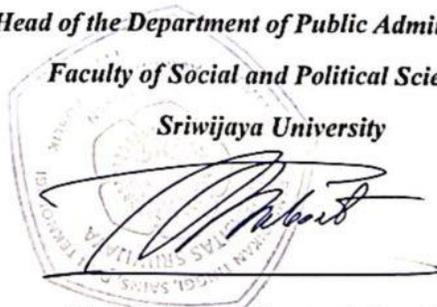
Advisor,



Januar Eko Aryansah, S.IP, S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Palembang, 17 March 2025

Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Transformasi Digital dalam Manajemen Kepegawaian: Studi Penggunaan *e-Government* Aplikasi SIMPEG di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Siska, S.E. dan Bapak Alm. Sahzan Syafri, S.H., M.H., yang dengan kasih sayang tanpa syarat, kesabaran yang tak terbatas, dan doa yang selalu dipanjatkan, telah menjadi sumber cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tanpa henti, mereka selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengorbanan yang sangat berarti, menjadikan harapan mereka sebagai motivasi dan tujuan dalam setiap usaha yang penulis lakukan.
3. Kakak dan Adik penulis, Muhammad Subhan Alghifari dan Muhammad Farras Rakha yang selalu menjadi penyemangat, sumber kebahagiaan, dan dukungan tanpa henti. Kehadiran mereka begitu berharga bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi, senantiasa mampu menghilangkan rasa lelah dan memberikan energi baru untuk terus melangkah maju.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Prof. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing serta memberikan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Setiap saran dan masukan yang beliau berikan sangat berharga bagi penulis dan berperan penting dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Penulis berterimakasih kepada Unit Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri beserta staff yaitu Ibu Eka, Mas i'ik, Mba Rifany, Mba Syifa, Mas Herried, Mas Rizfandy yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat kerjasama mereka, penulis dapat mengumpulkan data penelitian dengan optimal.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menempuh studi di FISIP Universitas Sriwijaya.
10. Seseorang spesial yang penulis temui, Adam Fuqson Nahdiawan yang terus memberikan dukungan, cinta, dan semangat tanpa henti. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Kehadirannya telah menjadi sumber motivasi besar dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Aurora Ashila Ramadhani dan Decy Finadia Khairunisa yang telah menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Petrin, Nisa, Rido, Ariq, Fane, Daffa, Bagus, Kevin, dan Ryan yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama masa perkuliahan. Dukungan dan semangat yang mereka berikan serta kebersamaan bersama mereka telah membuat perjalanan akademik ini terasa ringan dan bermakna.
13. Teman-teman kitasatucerita yaitu Tamara, Christy, Mayla, Bintang, Genta, Taheer, Fahmi, Dwi, dan Umam yang telah menjadi keluarga kedua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan. Terimakasih untuk kebersamaan dan tawa yang telah dilalui selama ini.

14. Kitty, yang setia menemani setiap waktu dan menghadirkan kegembiraan dan ketenangan dikala penat.
15. Penulis juga berterimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, pantang menyerah, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun banyak tantangan yang telah dihadapi selama perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap akan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Palembang, 17 Maret 2025

ZAHRA ZANIA

NIM.07011282126156

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Transformasi Digital.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Transformasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Digitalisasi	Error! Bookmark not defined.
2.2 <i>E-Government</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian <i>E-Government</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Tipe Interaksi E-Government.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Manfaat E-Government.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Aspek dalam Keberhasilan Pengembangan E-Government.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Manajemen Kepegawaian.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Manajemen.....	Error! Bookmark not defined.

2.3.2	Kepegawaian	Error! Bookmark not defined.
2.4	Sistem Informasi Manajemen	Error! Bookmark not defined.
2.4.1	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Error! Bookmark not defined.
2.5	Pegawai Negeri Sipil	Error! Bookmark not defined.
2.6	Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.7	Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
3.1	Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2	Definisi Konsep	Error! Bookmark not defined.
3.3	Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4	Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5	Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8	Teknik Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
3.9	Jadwal Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2	Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Kepegawaian di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Aplikasi SIMPEG	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Support	Error! Bookmark not defined.
4.3.3	Capacity.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4	Value	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.2 Matriks Penelitian.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Beranda Aplikasi SIMPEG 1	21
Gambar 2.1 Tipe Interaksi e-Government.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.4 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.5 Infrastruktur Teknologi yang Berada di Ditjen Bina Adwil.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.6 Fitur-Fitur di Aplikasi SIMPEG	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.7 Berkas Fisik Pegawai	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 2. Pedoman Observasi	77
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi.....	78

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Ditjen Bina Adwil	: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
e-Gov	: Electronic Government (Pemerintahan Elektronik)
G2B	: Government to Business
G2C	: Government to Citizens
G2E	: Government to Employees
G2G	: Government to Government
IT	: Information Technology (Teknologi Informasi)
KDN	: Kementerian Dalam Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SOP	: Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar)
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, telah menuntut kita untuk melakukan perubahan termasuk dalam dunia teknologi. Perkembangan teknologi ini mendorong adanya transformasi digital di seluruh dunia. Transformasi digital merupakan penggunaan teknologi guna meningkatkan proses serta menghasilkan hasil yang lebih baik. Adanya transformasi digital tidak hanya modernisasi perangkat keras dan lunak, namun juga mencakup perubahan dalam cara suatu organisasi bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan layanan (Nastia, 2024). Suatu proses yang memiliki tujuan guna meningkatkan suatu entitas dengan memicu perubahan yang signifikan pada propertinya melalui adopsi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, serta konektivitas.

Dalam pemerintahan, perubahan sistem menuju digital merupakan suatu langkah krusial yang memiliki tujuan dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka serta responsif, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Digitalisasi dalam pemerintahan merupakan upaya guna memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia adalah salah satu upaya strategis untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Nurlaila Nurlaila et al., 2024). Teknologi yang semakin berkembang pesat, pemerintah Indonesia dituntut dalam melakukan transformasi pelayanan yang berbasis digital. Dalam hal ini, visi dan strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam konsep digital adalah memanfaatkan adanya *e-government*.

E-Government merupakan upaya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penggunaan sistem komputer atau informasi di lembaga/organisasi pemerintah bertujuan guna mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pencarian, serta pengolahan data yang mengakibatkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat merupakan yang dimaksud dengan *e-government*. Maka, *e-government* difokuskan sebagai alat bantu pegawai pemerintah dalam melakukan pelayanan administrasi. (Cahyadi, 2003). Digitalisasi dalam pemerintahan dapat menghasilkan suatu kecepatan dalam penyampaian informasi, efisiensi, jangkauan yang global serta transparansi guna mewujudkan *good governance* (Mariyanto & Supriansyah, 2021). *E-government* adalah penerapan dari tata kelola pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat.

E-government diharapkan dapat menjadikan instansi-instansi pemerintah yang lebih transparan, efektif, serta efisien (Nastia, 2024). *E-government* adalah aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas pemerintah (Tasyah et al., 2021). Beberapa keuntungan dalam implementasi *e-government* salah satunya yaitu guna meningkatkan dan memudahkan dalam bertukar informasi antar instansi pemerintah. Dengan begitu, dapat memudahkan dalam akses layanan publik serta informasi dalam suatu instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkannya transparansi suatu instansi.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, bahwa pemerintah Indonesia perlu menggunakan teknologi telematika guna membantu dan mewujudkan *good governance*. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-government*, pengembangan *e-government* memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dalam pengembangan *e-government* dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah. Selain itu, menetapkan tujuan strategis termasuk pembangunan sistem pelayanan terjangkau dan handal, penataan sistem dan prosedur operasi pemerintah daerah, serta meningkatkan sumber daya manusia pemerintah.

Penting untuk melakukan transformasi digital bagi pemerintah karena banyaknya kelebihan yang didapatkan terutama dalam aspek memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Digitalisasi *e-government* perlu dilakukan oleh pemerintah guna membantu dalam fasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, transparansi. Digitalisasi dalam lingkup pemerintahan dapat menjadi suatu langkah yang strategis dalam menghadapi berbagai tantangan modern dalam pengelolaan pemerintahan. Digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu pemerintah dalam mempercepat proses administrasi serta mengurangi beban kerja manual. Dengan adanya sistem digital, dapat membantu dalam pengelolaan data, pengelolaan dokumen, serta penyelesaian layanan publik sehingga biaya serta waktu yang digunakan menjadi lebih hemat. Masyarakat maupun pegawai pemerintah dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan yang akan meningkatnya kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik. (Xenia Papadomichelaki, 2009)

Digitalisasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah karena informasi serta layanan yang ada dalam *e-government* lebih transparan. Hal ini juga dapat memudahkan koordinasi antar instansi

pemerintah dikarenakan dengan adanya digitalisasi atau sistem digital dapat mengintegrasikan data dan komunikasi yang lebih efektif di tingkat pusat maupun daerah. Digitalisasi perlu dilakukan karena data dapat dikelola, dianalisis, disimpan secara lebih efektif dan efisien. Instansi-instansi pemerintah perlu untuk melakukan transformasi digital dikarenakan era globalisasi saat ini yang menuntut kita untuk semakin modern. Saat ini, banyak instansi pemerintah yang telah melakukan transformasi digital, salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) merupakan salah satu kementerian yang berperan strategis di pemerintahan Indonesia. Kemendagri RI merupakan salah satu kementerian dalam pemerintahan di Indonesia yang memiliki tanggung jawab atas urusan dalam negeri, termasuk terkait pembinaan pemerintah daerah, administrasi kewilayahan, kependudukan, dan penguatan otonomi daerah. Maka itu, Kemendagri RI memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, serta efektif. Kemendagri RI berfungsi dalam membina pemerintah daerah, mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta menangani urusan kewilayahan termasuk penetapan batas wilayah. Salah satu direktorat jenderal dibawah naungan Kemendagri RI yang telah melakukan digitalisasi adalah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

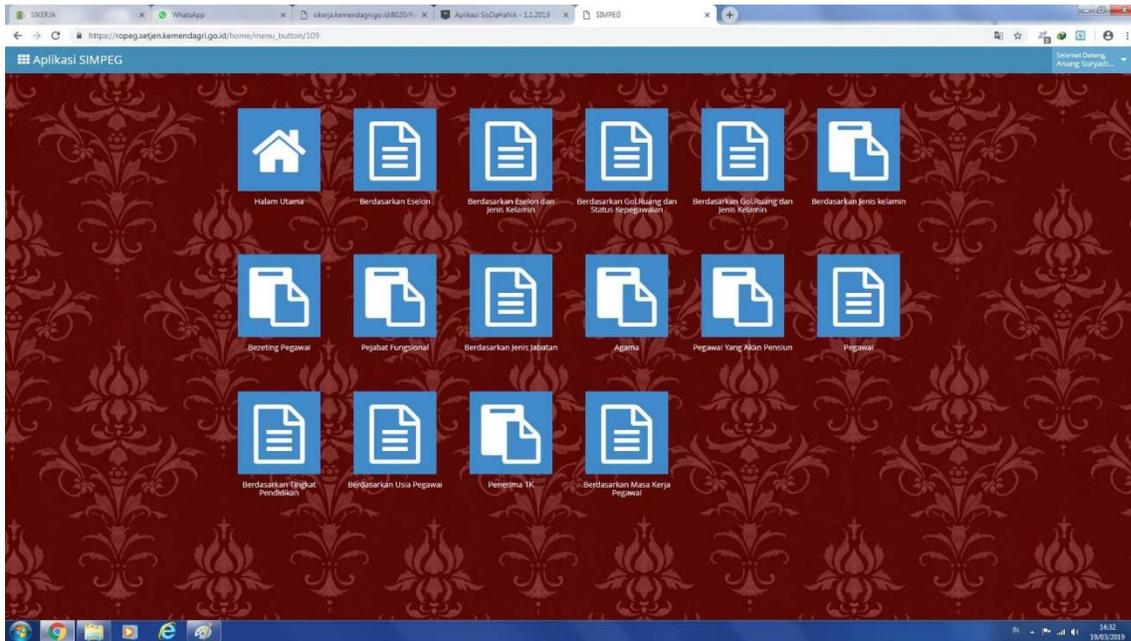
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) merupakan salah satu direktorat jenderal dibawah Kemendagri yang berperan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan atas urusan pemerintahan yang mencakup wilayah administrasi, termasuk dalam hal manajemen kepegawaian. Ditjen Bina Adwil telah melakukan digitalisasi guna memudahkan pelayanan serta manajemen kepegawaian sehingga dapat menghasilkan output

yang efektif dan efisien. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam manajemen kepegawaian dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI adalah aplikasi SIMPEG.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem informasi yang dibuat guna mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat, serta akurat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam memanfaatkan sistem informasi kepegawaian dalam pengelolaan data kepegawaian yang bertujuan untuk mendukung proses administrasi yang cepat, lengkap dan akurat (Sulistiawati et al., 2024). Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri atau SIMPEG-KDN merupakan rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, serta terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan yang berguna dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Adanya aplikasi SIMPEG bertujuan guna mendukung pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Kemudian, mewujudkan transparansi kinerja Biro Kepegawaian dan Unit Kerja Kepegawaian dalam memberikan layanan kepegawaian. Menciptakan layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan *Database* SIMPEG untuk optimalisasi pemutahiran database PNS Kemendagri. Aplikasi SIMPEG dapat digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai pendukung kegiatan administrasi kepegawaian dan dapat digunakan dimana saja termasuk dari rumah. Aplikasi ini memiliki berbagai manfaat yaitu salah satunya adalah menggantikan absensi kehadiran dengan mesin elektronik *finger print*.

Gambar 1.1 Beranda Aplikasi SIMPEG



Sumber: <https://webropeg.kemendagri.go.id/>

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang digunakan di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang lebih fleksibel, Kementerian Dalam Negeri juga mengembangkan *Mobile SIMPEG*. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi pegawai dalam mengelola data mereka melalui perangkat mobile. Dengan *Mobile SIMPEG*, pegawai dapat mengakses informasi terkait status kepegawaian, absensi, dan berbagai layanan administrasi lainnya kapan saja dan dimana saja. Meskipun aplikasi ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung administrasi dan manajemen pegawai, terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, salah satu permasalahan utama yang seringkali dihadapi yaitu kinerja aplikasi yang lambat. Pengguna sering mengalami keterlambatan dalam mengakses data ataupun melakukan input informasi yang dapat mengganggu proses administrasi serta mengurangi produktivitas pegawai. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infrastruktur teknologi yang tidak memadai, atau masalah dalam pengelolaan data yang tidak efisien. Selain itu, kurangnya inovasi dalam aplikasi SIMPEG. Inovasi adalah salah satu kunci utama dalam pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi sistem informasi untuk terus beradaptasi serta memperbarui fitur-fitur yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Namun, aplikasi SIMPEG cenderung stagnan dan tidak mengalami pembaruan yang signifikan, sehingga tidak mampu memenuhi harapan pengguna yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam pengelolaan data pegawai. Kemudian, kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) terkait operasional aplikasi SIMPEG.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Samauna H bahwa kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai terkait operasional aplikasi SIMPEG menjadi persoalan dalam operasional aplikasi. Meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data pegawai, tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikannya dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai, sosialisasi yang kurang optimal terkait penggunaan aplikasi. Hal ini menyebabkan banyak pegawai yang merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang pada gilirannya dapat menghambat proses administrasi dan pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekurangan-kekurangan pada aplikasi SIMPEG serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi digital *e-government* dalam manajemen kepegawaian *e-government* di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian *e-government* di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta literatur di bidang transformasi digital, khususnya dalam manajemen kepegawaian di institut pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Kementerian Dalam Negeri terkait efektivitas dan efisiensi aplikasi SIMPEG guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen kepegawaian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pegawai untuk memahami manfaat dari transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26–49. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Ahungsehiwu, A., Daud, A., Liando, M., & Londa, Y. (2017). *Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV)*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Ainun, F. P., Mawarni, H. S., Sakinah, L., Lestari, N. A., & Purna, T. H. (2019). Identifikasi Transformasi Digital Dalam Dunia Pendidikan Mengenai Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi. *Teachin.Id*, 6(1), 1570–1580. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2778>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Manajemen Electronic Government di Kabupaten Semarang*. 6.
- Atik Krustiyati Kartina, R. (2023). *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Indonesia* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *The Winners*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796>
- Djawa, M. K., & Durinta, P. (2015). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 3(3), 1–15.
- Fauzi, A. R., Hakim, A., Pendayagunaan, K., Negara, A., Pendayagunaan, K., & Negara, A. (2024). *Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik (Implementasi Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Jember) Digitalization of Public Services (Implementation of Digitalization of Public Services in the Kediri City Govern*. 7(10), 3727–3734. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6146>

- Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 128–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>
- Indrajit, R. E. (2006). Konsep dan Strategi Electronic Government. In *Electronic Government* (Vol. 84). https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- Jamaludin, S., Kom, M. K., Sulistianto, S. W., Mi, A., Pd, S., Kom Debby Marthalia, M., Rinandita Wikansari, M. M., Psi, S., Psi, M., & Dr, P. (2022). *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis Penerbit Cendikia Mulia Mandiri*.
- Komalasari, S., Hanafi, I., & Setyowati, E. (2014). Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)(Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jap*, 2(4), 613–619.
- Lumingkewas, E. M. C. (2019). (Ilmu dan Seni Mengatur Organisasi). *Konsep Dasar Manajemen: Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi*, 1–75.
- Mariyanto, I., & Supriansyah, S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 4(3), 173–179. <https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3369>
- Mustofa. (2018). *Digitalisasi Koleksi Karya Sastra Balai Pustaka Sebagai Upaya Pelayanan di Era Digital Natives* (p. 63).
- Nastia, N. (2024). Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 268–281. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9799>
- Natalia, T. W., & Wibowo, H. (2018). Proses Dan Alasan Terjadinya Transformasi Masjid Raya Bandung. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 2(3), 170. <https://doi.org/10.31848/arcade.v2i3.49>
- Nurhasanah, N., Lisman Manurung, & Siti Julaeha. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1), 52–59. <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9521>

- Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, & Nurhasanah Nurhasanah. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37.
<https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- Oktaviyana, A. (2023). Analisis Dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. *Circle Archive*. <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/21%0Ahttp://circle-archive.com/index.php/carc/article/download/21/16>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203052/peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-137-tahun-2022>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203052/peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-127-tahun-2017>
- Rahayua, I., Setiawan, D. R., & Sofyan, M. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Mangga Besar Tahun 2021. *Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia*, 1(6), 651–662.
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Riduan, M., & Riza Firdaus, M. (2024). Transformasi Digital Dan Kinerja : Kajian Peran Budaya Organisasi. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 48–58.
- Ruhukail, C. J. (2021). Persepsi Pustakawan terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 23(2). <https://doi.org/10.7454/jipk.v23i2.002>
- Sari, A. P. (2019). Manajemen Kepegawaian. *Research Gate, November*, 1–24.
<https://www.researchgate.net/publication/337159423>

- Sulistiawati, D., Rachmayanti, A., Rahayu, P. S., Anggraeni, P., & Hidayat, Q. (2024). *Refresh : Manajemen Pendidikan Islam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem Informasi Manajemen. 2, 1–7.*
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(2), 212–224.* <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Xenia Papadomichelaki, G. M. (2009). A Multiple-Item Scale for Assessing. *Journal of Service Research, 7(3), 213–233.* <https://doi.org/10.1007/978-3-642-03516-6>